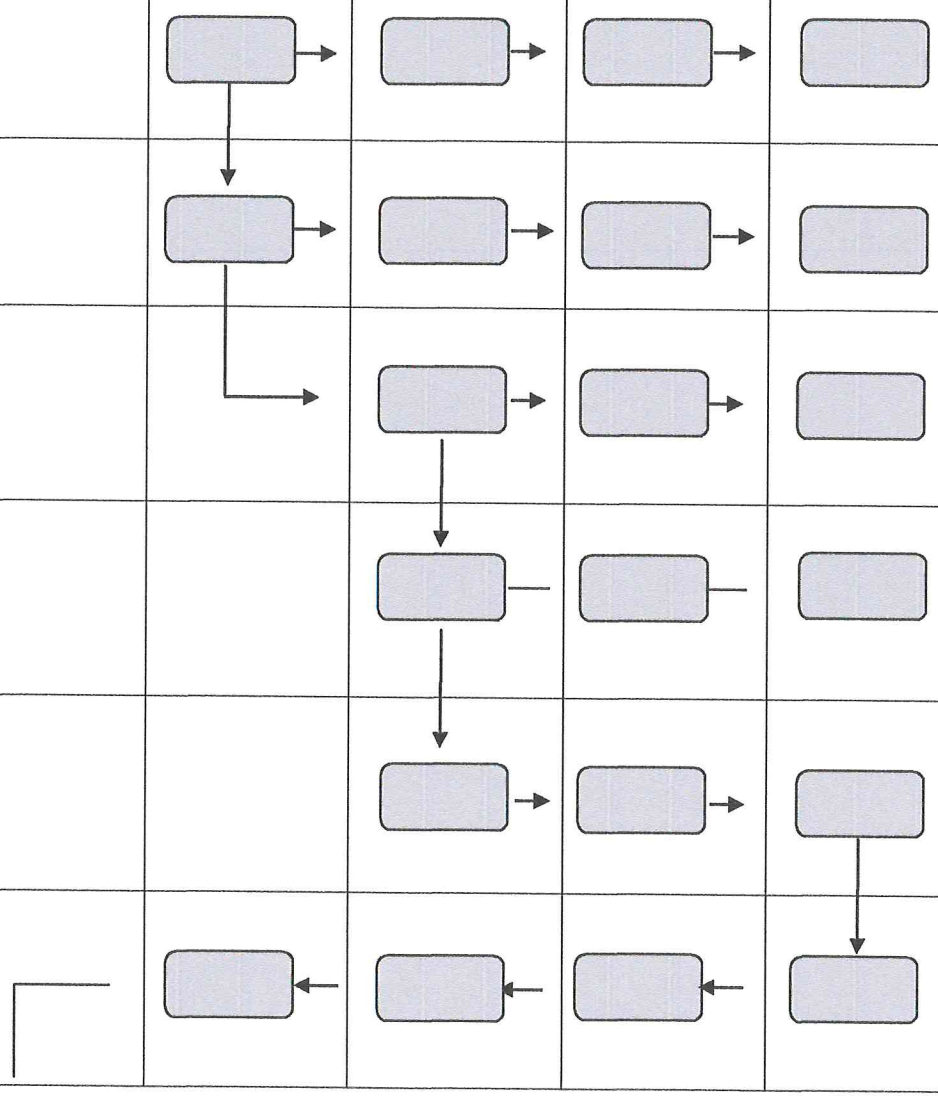
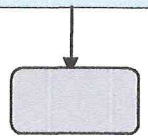
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN** **DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP** : **W.32.OT.02.02 – 16** **TANGGAL PEMBUATAN** : **03 Februari 2025** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **03 Februari 2025** **DISAHKAN OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH,** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002** **NAMA SOP** : **Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah**
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan analiis kebijakan 2. Pendidikan minimal S1 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau 2. Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA BSK HUKUM	KAKANWIL	KADIV	KAPOKJA	JFT DAN JFU	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pembentukan Tim Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data, informasi, berkas	
2.	Menentukan kebijakan yang akan di evaluasi						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data	
3.	Menentukan tujuan dan desain evaluasi kebijakan dan pendekatan yang akan digunakan						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data	
4.	Melaksanakan Pengumpulan Data Lapangan						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	3 hari	Data	
5.	Melakukan Analisis Data Interprestasi Hasil Evaluasi						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Data	
6.	Menyusun Laporan Evaluasi Kebijakan						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Data, informasi, berkas	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA BSK HUKUM	KAKANWIL	KADIV	KAPOKJA	JFT DAN JFU	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan & Diseminasi Temuan						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	10 menit	Rekomendasi evaluasi kebijakan	